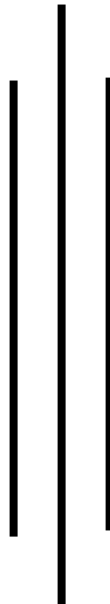




**LAPORAN BULANAN
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
POLDA KEPULAUAN RIAU
BULAN AGUSTUS 2019**



BATAM, SEPTEMBER 2019



**LAPORAN BULANAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
POLDA KEPULAUAN RIAU BULAN AGUSTUS 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Wilayah Propinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan memiliki luas 252.601 Km². luas tersebut merupakan wilayah perairan yang memiliki 2.408 pulau besar, kecil dan 22 pulau terluar, serta berbatasan langsung dengan negara - negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam sehingga memiliki trend kerawanan Kamtibmas yang cenderung mengalami peningkatan seperti : Laka laut, TKI Illegal, Illegal Logging, Penyelundupan, Pencurian hasil laut, Pencemaran lingkungan, dan Perkelahian antar kelompok nelayan.
- b. Ditpolairud adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polda Kepulauan Riau yang berada di bawah kapolda, mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakupi Patroli, penegakan hukum, Bimas Perairan, deteksi dini, pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan kapal atau kapal tenggelam yang terjadi diwilayah perairan serta melakukan pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda Kepulauan Riau.
- c. Untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif khususnya di Perairan Polda Kepulauan Riau maka Ditpolairud Polda Kepulauan Riau menggelar seluruh kekuatannya baik yang menyangkut Personel, Materil dan Alut di lapangan agar tercapai situasi perairan Polda Kepulauan Riau yang kondusif.
- d. Penyusunan Laporan Bulanan Ditpolairud Polda Kepulauan Riau ini dapat dijadikan informasi dan bahan masukan bagi pimpinan serta untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan Operasional dan pembinaan khususnya di perairan.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

c. Peraturan.....

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- d. Surat Kadivhumas Polri nomor : B/108/I/2018/Humas tanggal 24 Januari 2017 tentang Format Laporan kegiatan Bulanan Bidhumas Polda;
- e. Rencana Kerja Ditpolairud Polda Kepulauan Riau tahun 2019.

3. **Maksud dan tujuan**

- a. Maksud.
Laporan bulanan ini dibuat dan disusun guna memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas Satuan Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau dan perkembangan pelaksanaan tugas setiap bulannya.
- b. Tujuan.
Tujuan penyusunan laporan bulanan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pimpinan tentang pelaksanaan tugas Satuan Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau, dengan harapan mendapat umpan balik guna penyempurnaan.

4. **Ruang Lingkup**

Laporan bulanan ini meliputi pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai selama periode bulan Juni 2019.

5. **Tata Urut**

BAB I PENDAHULUAN
 BAB II VISI MISI
 BAB III KEKUATAN PERSONEL
 BAB IV ANALISA DAN EVALUASI
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
 BAB VI PENUTUP

6. **Wilayah**

- a. Geografi

Letak dan Batas Wilayah

Perairan Polda Kepulauan Riau terletak pada Posisi 0⁰ 15' LU s/d 0⁰ 45' LU dan 103⁰ 11' BT s/d 109⁰ 10' BT. Batas – batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan laut Cina Selatan, Singapura, Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Polda Jambi, sebelah Barat dengan Polda Riau, sebelah timur berbatasan dengan Polda Kalimantan Barat.

Luas Wilayah

Luas Wilayah

Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah lebih kurang 252.601 Km² yang terdiri dari 10.794,24 Km² daratan yang berupa 1.350 pulau bernama, 1.058 pulau belum bernama serta 20 pulau terluar, sedangkan luas perairan mencapai 241.807 Km².

Karakteristik Perairan

Perairan di Kepulauan Riau memiliki karakteristik perairan yang dangkal serta banyak Batu Karangnya juga memiliki arus yang sangat kuat, sehingga dapat membahayakan bagi kapal – kapal yang melintas di perairan Kepulauan Riau diantaranya :

1. Perairan yang memiliki arus kencang
 - Perairan Natuna
 - Perairan Lingga
2. Perairan yang dangkal dan banyak batu karangnya
 - a) Perairan Tanjung Batu / Kunder
 - b) Perairan Tanjung Balai Karimun
 - c) Perairan Pulau Batam
 - d) Perairan Tanjung Pinang

b. Pembagian Wilayah (Struktur Pemerintahan)

Wilayah Hukum Polda Kepulauan Riau berada dalam Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota dengan perincian sebagai berikut :

- a) Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 74 (enam puluh empat) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 3.990 Km² dan jumlah penduduknya sekitar 1.236.399 jiwa. Letak Kota Batam yang sangat strategis, berhadapan langsung dengan Singapura, sehingga berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan telah ditetapkan sebagai kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas BBK (Batam, Bintan dan Karimun) / FTZ;
- b) Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan jumlah penduduk sekitar 204.735 jiwa, Kota Tanjungpinang sempat menjadi ibukota Provinsi Riau yang pertama, namun sejalan dengan perkembangannya sesuai dengan SK Mendagri Nomor 5 tanggal 21 Juni 2001 Kota Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonomi;
- c) Kabupaten Bintan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, meliputi 15 (lima belas) kelurahan dan 36 (tiga puluh enam) desa dengan luas wilayah 62.908,42 Km² dan jumlah penduduk sekitar 154.584 jiwa. Merupakan salah satu kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas BBK (Batam, Bintan dan Karimun) / FTZ, selain juga dikenal sebagai pusat pariwisata terpadu dan memiliki kawasan industri yang terus berkembang;

d). Kabupaten.....

4.

- d) Kabupaten Karimun dengan letak ibu kotanya di Tanjung Balai Karimun, terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan serta 42 (empat puluh dua) desa, jumlah penduduk sekitar 227.277 jiwa dengan luas wilayah sekitar 7.984 Km², memiliki keunggulan tersendiri karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, sehingga merupakan salah satu basis pertumbuhan IMS - GT (Indonesia, Malaysia, Singapura - Growth Triangle) serta merupakan salah satu kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas BBK (Batam, Bintan dan Karimun) / FTZ;
- e) Kabupaten Lingga dengan ibukota Dabo Singkep terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 7 (tujuh) Kelurahan serta 74 (tujuh puluh empat) desa, luas wilayah sekitar 211.772 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 88.971 jiwa, daerah Kabupaten Lingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan wisata bahari dan pertanian;
- f) Kabupaten Natuna letak ibu kotanya di Ranai terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan meliputi 6 (enam) Kelurahan dan 70 (tujuh puluh tujuh) desa, dengan luas wilayah sekitar 2009,04 Km² dan jumlah penduduk sekitar 75.282 jiwa, sedangkan luas lautan 141.901,2 Km², merupakan daerah yang kaya dengan minyak dan gas bumi.
- g) Kabupaten Anambas letak ibu kotanya di Tarempa terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 2 (dua) Kelurahan dan 52 (lima puluh dua) desa, dengan luas wilayah 46.664,14 Km² dengan luas lautan 46,033,81 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 40.921 jiwa, daerah Kabupaten Anambas sangat potensi untuk dikembangkan sebagai daerah pariwisata, pertanian, pertambangan dan perikanan.

c. Demografi

Jumlah Penduduk dalam wilayah provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pendataan dari BPS dan Dinas Kependudukan Tahun 2016 sebanyak **2.028.439** jiwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	Jumlah
1	2	5
1	Kota Batam	1.188.985
2	Kota Tanjungpinang	202.215
3	Kab. Karimun	225.298
4	Kab. Bintan	153.020
5	Kab. Lingga	88.591
6	Kab. Natuna	74.520
7	Kab. Anambas	40.414
	Jumlah	2.028.439

d. Sumber daya alam

d. Sumber Daya Alam

1) Potensi Hutan

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdapat daerah perhutanan yang ditumbuhi berbagai jenis pohon. Adapun daerah perhutanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau seperti di Bintan, Lingga dan Natuna. Sedangkan hutan bakau tersebar luas di seluruh pesisir Propinsi Kepulauan Riau.

2) Potensi Pertanian dan Perkebunan

Pertanian dan perkebunan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak dijadikan mata pencaharian utama bagi penduduk yang disebabkan tanahnya yang kurang subur dan banyak mengandung bauksit, akan tetapi akhir-akhir ini pemerintah Propinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota menggalakkan wilayah Propinsi Kepulauan Riau sebagai daerah pertanian seperti halnya Pulau Galang, Bintan dan Karimun sebagai penghasil tanaman palawija (sayur-sayuran dan umbi-umbian), cengkeh juga perkebunan sawit yang hasilnya dapat di konsumsi sendiri juga dapat di ekspor ke Luar Negeri.

3) Potensi Kekayaan Laut

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dikelilingi lautan hampir tiga perempat luas wilayahnya. Potensi kekayaan laut cukup besar, sebagian masyarakat penduduk menggunakan mata pencaharian sebagai nelayan dan hasilnya cukup untuk kebutuhan daerah sendiri dan bagi pengusaha ikan juga ada juga yang melakukan pengiriman ke luar daerah seperti Jambi juga Medan dan bahkan mengekspor ke Luar Negeri (Malaysia dan Singapore).

4) Pertambangan

a) Timah

Tambang Timah terdapat dan masih beroperasi di perairan Prayon Kecamatan Kundur Barat, Kab. Karimun dan di Kab. Lingga, yang dikelola oleh:

- PT. Tambang Timah Unit Kundur, dengan jumlah ekspor timah ke Singapura sebanyak 3.340 ton;
- PT Eunindo Usaha Mandiri di perairan pulau Kenipan Kec. Kundur Barat dengan menggunakan Kapal Isap serta memiliki Smelter di Desa Pangke Kec Pangke;
- PT. PENTA INTI MANDIRI, Alamat : Jl. Raja Haji Fisabillah Pantai Pelawan RT. 03 RW. 03 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun Kepulauan Riau 29161, Lokasi Tambang : Blok IV Kec. Karimun dan Kec. Kundur Barat;
- PT. Karimun MINING, Alamat : Jl. Nusantara No. 89 Kab. Karimun Kepulauan Riau 29161, Lokasi Tambang : Blok A Kec. Kundur, Blok B Kec. Karimun, Blok C Kec. Tebing;
- PT. Singkep Timas Utama di Kec. Singkep Nomor Izin : 159 / VI / 2002 tanggal 11 Juni 2002 s/d 11 Juni 2012 seluas 37.000 Ha, dengan alamat Perusahaan Jl. Pemandian Bukit Timah Dabo Singkep (Eksplorasi Timah)

b) Batu Granit.....

b) Batu Granit

Tambang Batu Granit di Wilayah Provinsi kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Karimun dan Kab. Bintan yang dikelola oleh :

- PT. Karimun GRANITE, Alamat : Pasir Panjang Tanjung Balai Karimun;
- PT. PASIFIC GRANITAMA, Alamat : Jl. Pangka No. 88 Kec. Meral Tanjung Balai Karimun;
- PT. BUKIT ALAM PERSADA, Alamat : Bukit Jambang Desa Pangke Kec. Meral Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau;
- PT. Bukit Granite Mining Mandiri Pongkar Tebing Karimun;
- PT. RIAU ALAM ANUGERAH INDONESIA, Alamat : Bukit Potot Desa Pangka Kec. Meral Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau;
- PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA, Alamat : Sememai Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
- DAHANA, Bukit Meninjau Parit Benut Pangke Kec Meral Barat 0777-326054;
- PT. Mitra Investindi Tbk, berlokasi di Bukit Piatu Kecamatan Gunung Kijang, penanggung jawab perusahaan an. DIAH PERTIWI GANDHI;
- PT. Bintan Nusamulti, berlokasi di Bukit Kijang Kecamatan Gunung Kijang, penanggung jawab perusahaan an. Sdr. SAKUR.

c) Batu / Biji Besi

PT. Bina Perkasa di Desa Bakong Kec. Singkep Barat seluas 73 Ha, dengan Alamat Perusahaan Komplek Nagoya Garden Blok G No. 2-3 Batam Telp. 0778 457279. (Eksplorasi Biji Besi);

d) Bauksit yang terdapat di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun.

e) Minyak Bumi / Gas

Minyak Bumi yang terkandung di wilayah Kepulauan Riau terletak di wilayah kabupaten Natuna yang berlokasi di laut Cina Selatan dan terletak 296 Km sebelah Barat Pulau Natuna. Pegeboran Minyak Lepas Pantai dilakukan oleh beberapa perusahaan diantaranya:

- PT. CONOCO PHILLIPS;
- PT. PRIMER OIL, Jumlah Karyawan terdiri dari 114 (Seratus Empat Belas) Karyawan, Alamat Perusahaan Matak Base Telp. 0215151800;
- PT. STAR ENERJIC;
- PT. PAN dengan jumlah Karyawan terdiri dari 185 (sertaus Delapan Puluh Lima) orang dengan jumlah Karyawan Asing Nihil. Alamat Perusahaan di Matak Kecil Desa Payalaman Kab. Anambas Telp. 0772-31328.

e. Ipoleksosbud Hankam

1) Aspek Ideologi

- a) Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya masih berpegang pada Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia, belum ada indikasi kelompok/aliran yang mengarah pada pembentukan ideologi lain selain Pancasila;
- b) Di Kepulauan Riau masih terdapat kelompok/suku terasing di beberapa wilayah perairan Kepulauan Riau yang dinamakan suku laut karena tinggalnya diatas perahu yang terapung dilautan dan berada di pinggir-pinggir pulau wilayah Kepulauan Riau yang kemungkinan besar belum memiliki agama/kepercayaan (animisme), pendidikan/pengetahuan yang cukup tentang Pancasila sebagai ideologi tunggal Bangsa Indonesia saat ini;
- c) Bergesernya nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan pedoman pokok Pancasila dalam berkehidupan juga mulai terlihat dengan adanya perkumpulan/kelompok kesukuan yang lebih bersifat pada kepentingan ekonomi kelompoknya dengan mengedepankan kegiatan - kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan terkesan berkompetisi untuk menguasai beberapa titik/lokasi usaha tertentu dengan tujuan melakukan dominasi dalam hal "pengamanan" sehingga sering berimplikasi pada terjadinya konflik horisontal yang dampaknya dapat meluas karena mendompleng nama suku tertentu yang seakan - akan berlatarbelakang SARA.

2) Aspek Politik

- a) Secara umum situasi politik di Kepulauan Riau cukup kondusif. Hal ini terlihat dari berbagai agenda politik di pemerintahan khususnya eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar. namun terdapat beberapa kebijakan Pemerintah setempat yang bertentangan dengan legislatif dan masih dapat diatasi dengan pendekatan/cara-cara yang baik dan produktif;
- b) Kekosongan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terjadi sehubungan telah dilantiknya Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2016 – 2021 Dr. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si menjadi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan telah meninggalnya Gubernur Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2016 – 2021 Drs. H. M. SANI, sehingga terjadi manuver politik untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur Prov. Kepulauan Riau yang berdampak pada gangguan Kamtibmas;
- c) Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan Pemilihan umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang;
- d) Dalam hal pemberdayaan pulau-pulau terluar juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini perlu diperhatikan serius mengingat beberapa pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau diketahui telah dikelola oleh investor asing seperti Pulau Bawah di Natuna, Pulau Penggalap dan Pulau Segayang di Kecamatan Galang Kota Batam. Kurangnya pengawasan terhadap beberapa pulau tersebut akan berdampak terjadinya penjarahan oleh pihak asing;
- e) Rencana pemekaran wilayah terhadap Kab Kep. Kundur, Kota Natuna, Kab. Natuna Selatan, Kab. Natuna Barat yang diusulkan Gubernur Kepulauan Riau ke Mendagri dengan nomor surat : 130-/0188/set tanggal 26 Februari 2016.

3) Aspek ekonomi.....

- 3) Aspek ekonomi
 - a) Tumpang Tindih dan Duplikasi kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam yang dimana ada banyak aturan bahkan undang – undang tentang FTZ yang dinilai tidak efektif . Hal tersebut berdampak adanya wacana tentang pembubaran terhadap BP Batam;
 - b) Adanya permasalahan tentang kampung tua yang dimana keberadaan Kampung Tua di Kota Batam sangat dipertahankan oleh masyarakat kota Batam terutama suku asli karena terdapat tapak perkampungan, situs purbakala,kuburan tua, bangunan bernilai budaya tinggi,silsilah keluarga melayu yang menginginkan kepastian status dari BP Batam.
 - c) Penolakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang memberatkan warga masyarakat Kota Batam.
- 4) Aspek sosial budaya
 - a) Unjukrasa dan Mogok Kerja di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang disebabkan perselisihan industrial, dari perusahaan merasa sudah memberikan upah layak bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara mengingat mahal dan terbatasnya lahan di Batam dan adanya dualisme kewenangan antara Pemerintah kota batam dan Badan penguasaan (BP) Pulau Batam. Disisi lain pihak buruh beranggapan pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas kemudahan kepada pengusaha di Batam namun tidak memikirkan kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh sedangkan dalam perumusan upah minimum kota (UMK) hanya mencapai 60 % dari KHL bagi kesejahteraan buruh;
 - b) Permasalahan pendirian rumah ibadah dan aktivitasnya di wilayah Kota Batam dan Tanjungpinang yang disebabkan disamping permasalahan lahan tersendiri yang bermasalah kebanyakan masyarakat kurang sosialisasi dan pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian Rumah ibadah;
 - c) Pemasalahan sengketa lahan di wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan, khusus Pulau Batam terjadi dualisme Kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Penguasaan Batam (BP Batam);
 - d) Krisis listrik di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab Karimun yang disebabkan karena seringnya pemadaman listrik yang disebabkan mesin rusak (Over Haul) tidak sesuai dengan kapasitas daya yang didistribusikan yang tidak disosialisasikan ke masyarakat oleh pihak PLN
- 5) Aspek Pertahanan dan Keamanan
 - a) Kejahatan yang bersifat konvensional dan menonjol masih akan terjadi pada tahun 2018 diantaranya adalah Curas yang dilakukan dengan modus pengancaman dengan senpi / sajam, penganiayaan, jambret serta Curat yang dilakukan dengan modus pecah kaca mobil, memotong / merusak gembok pintu / pagar, congkel jendela.....

jendela/ pintu, merusak atap serta meningkatnya peredaran senjata api gelap serta Narkoba;

- b) potensi kerawanan penyebaran paham terorisme (ISIS) dan radikalisme melalui sarana media massa maupun elektronik yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya kekerasan di masyarakat Prov. Kepulauan Riau;
- c) tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Prov. Kepulauan Riau sangat signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah sebagian masyarakat cenderung meninggalkan norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum, anarkisme dan main hakim sendiri;
- d) sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungan masyarakat;
- e) kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan disertai anggapan bahwa masalah keamanan segalanya bisa diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
- f) rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan/ pelanggaran, tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
- g) belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem penegakan hukum;
- h) permasalahan yang berlatar belakang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan.

BAB II VISI DAN MISI

7. Visi dan Misi Polda Kepulauan Riau

a. Visi

Terwujudnya Polda Kepulauan Riau yang Profesional, Modern dan Terpercaya.

b. Misi

- 1) mewujudkan postur Polda Kepulauan Riau yang ideal, efektif dan efisien;
- 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polda Kepulauan Riau melalui pendidikan dan latihan;
- 3) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
- 4) meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
- 5) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 6) meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polda Kepulauan Riau yang profesional dan akuntabel;
- 7) Mengelola keamanan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan di wilayah Kepulauan Riau yang perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan lintas batas.

8. Visi dan Misi Ditpolairud Polda Kepulauan Riau

c. Visi

Mewujudkan Polisi Perairan sebagai pembina kamtibmas di wilayah perairan Polda Kepri dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang Profesional, Modern dan dipercayai oleh masyarakat.

d. Misi

- 1) mewujudkan postur Ditpolairud Polda Kepulauan Riau yang ideal, efektif dan efisien;
- 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditpolairud Polda Kepulauan Riau melalui pendidikan dan latihan;
- 3) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan di wilayah perairan Polda Kepri melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
- 4) meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah perairan Polda Kepri dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
- 5) mewujudkan penegakan hukum di wilayah perairan Polda Kepri yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

6) meningkatkan.....

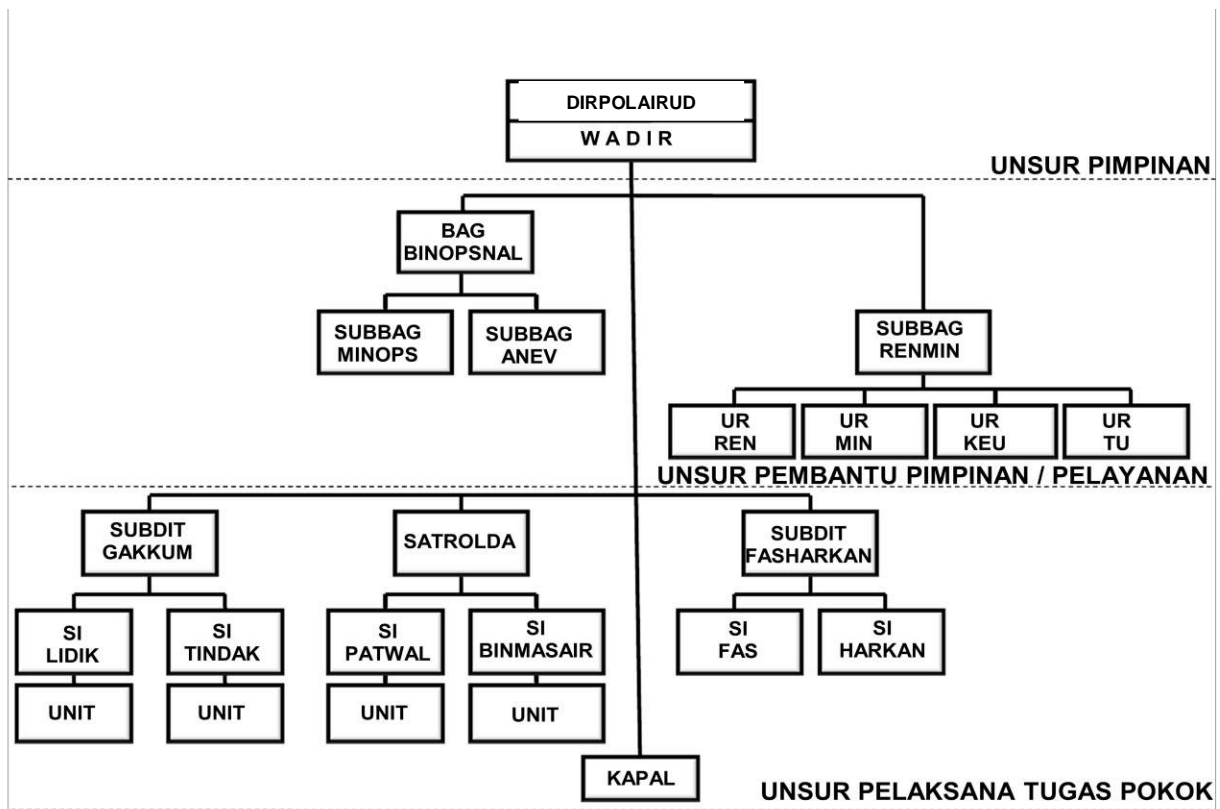
- 6) meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Ditpolairud Polda Kepulauan Riau yang profesional dan akuntabel;
- 7) mengelola keamanan di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan di wilayah Kepulauan Riau yang perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan lintas batas.

BAB III

KEKUATAN SATKER DITPOLAIRUD POLDA KEPULAUAN RIAU

9. Struktur Organisasi danTupoksi Ditpolairud Polda Kepulauan Riau

a. Struktur Organisasi Ditpolairud Polda Kepulauan Riau



b. Tupoksi Ditpolairud Polda Kepulauan Riau

1) Tugas Pokok

Ditpolairud bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda;

2) Fungsi.....

2) Fungsi

- a) pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
- b) pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
- c) pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
- d) pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;
- e) pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
- f) pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolairud.

10. Sumber Daya Personel dan Materiiil

a. Kekuatan Personel

Jumlah personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau sampai dengan bulan Agustus 2019 adalah 143 Personel dan ASN 3 orang.

NO	FUNGSI	JUMLAH		KELEBIHAN /KEKURANGAN
		DSP	RIIL	
1	PIMPINAN	2	1	-1
2	SUBDIT BINOPSNAL	7	7	-
3	SUBDIT GAKKUM	31	19	-12
4	SUBDIT FASHARKAN	17	8	-9
5	SATROLDA	35	18	-17
6	SUBBAGRENMIN	26	30	+4
7	KAPAL	78	64	-12
JUMLAH		196	149	-42

b. Daftar perfungsi personel Ditpolairud Polda Kepulauan Riau.

NO		NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN
1	2	3	4	5
		KELOMPOK PIMPINAN		
1	1	BENYAMIN SAPTA T, S.IK, M.Si	KBP / 70090400	DIRPOLAIRUD POLDA KEPRI
		SUBBAGRENMIN		
2	1	EDWAR	AKP / 65060045	PS. KASUBBAGRENMIN
3	2	HJ. ERMITA	PENATA TK I / 19630261990102001	KAUREN SUBBAG RENMIN
4	3	ZULKHAIRI	PENATA / 196706271992031004	KAURTU SUBBAGRENMIN
5	4	ROPIKOH	IPDA / 68110186	PAURREN I SUBBAGRENMIN
6	5	WAHYU PRIYANTO	IPDA / 70070131	KAURMIN SUBBAGRENMIN
7	6	TARSONO	AIPTU / 74040539	PS. PAMIN I URMIN SUBBAGRENMIN
8	7	MUKSIN SANRE	BRIPKA / 73030469	BA SUBBAGRENMIN
9	8	SUTOPO	BRIGADIR / 73080346	BAMIN SUBBAGRENMIN
10	9	APRI DARMA JAYA	BRIGADIR / 79040769	BA DITPOLAIR
11	10	YAN EFRI MURIZKI, S.S.	BRIGADIR / 86011065	BARENMIN
12	11	LEYANTO S.IP	BRIGADIR / 81061298	BA RENMIN/BA BMP

1	2	3	4	5
13	12	ABDUL RAHMAN SH	BRIPKA / 86051574	PS. PAMIN II SUBBAGRENMIN
14	13	INDRA. SH	BRIGADIR / 87081107	BA URLOG/PERSENJATAAN RENMIN
15	14	AKMAL	BRIGADIR / 85051954	BA SUBBAGRENMIN
16	15	UNTUNG NAINGGOLAN	BRIGADIR / 87121220	BA SESPRI/BA TAUD
17	16	NEGO RIKI MANURUNG	BRIGADIR / 88070847	DRIVER DIRPOLAIRUD
18	17	SANDI EKA SAPUTRA	BRIGADIR / 88080967	BAURTU SUBBAGRENMIN
19	18	CRISTINA	BRIPDA / 97100143	BA SUBBAGRENMIN
20	19	YUDISTIRA PRASETIA	BHARATU / 93040088	TA RENMIN / TA BMP
21	20	ROMI PRANATA	BHARATU / 94070022	TA URTU / SUPIR TRUK
22	21	DEDY HASILA	BHARATU / 92020173	TA SUPIR TRUK
23	22	MOHD. AZUAN	BHARADA / 96100800	TA SUBBAGRENMIN
		URKEU		
24	23	AZIS MUSLIM	IPDA / 70120070	PS. KAURKEU SUBBAGRENMIN
25	24	DEFRI HARYUMBOWO,A.Md	BRIPKA / 81081279	PS. PAURKEU SUBBAGRENMIN
26	25	DESTRI YANDA	BRIGADIR / 87121184	PS. PAURREN II SUBBAGRENMIN
27	26	ANGGA RAMADON	BHARADA / 95021094	TA URKEU SUBBAGRENMIN
		PROVOS		
28	27	HARRY SUSANTO	AIPTU / 76110176	KANIT PROVOS
29	28	ERA PRANSISKA	BRIPKA / 80081280	BA PROVOS
30	29	ALEXANDER TARIHORAN	BRIPKA / 84100842	BA PROVOS
31	30	SRIYONO	BRIGADIR / 78020720	BA PROVOS
		BAGBINOPSNAL		
32	1	VERNANS KANDOW	AKBP / 62110043	KABAGBINOPSNAL
33	2	ERWANDI	AKP / 61070597	PAURMINOPSNAL
34	3	AGAMALI	IPTU / 63110237	PAMIN I URTU / PS. PAUR SUBBAG ANEV
35	4	UDIN	IPDA / 67090355	PS. PAUR SUBBAGMINOPSNAL
36	5	ALDO GIYOVANNI. SH	BRIPKA / 86110004	BAMINOPSNAL / RADIO
37	6	KRISNATAL SINAGA	BRIGADIR / 85081994	BAMINOPSNAL
38	7	RAHMAD HIDAYAT	BRIGADIR / 86101303	BA RENMINOPSNAL
		SUBDITGAKKUM		
39	1	CAKHYO DIPO ALAM, SIK	AKBP / 78100923	KASUBDITGAKKUM
40	2	HUSAIN KARIM	KOMPOL / 64050798	SIINTELAIR SUBDITGAKKUM
41	3	AFRIZAL	IPTU / 75040805	PS. KANIT 2 SIINTELAIR SUBDITGAKKUM
42	4	IBRAHIM SEMBIRING	IPDA / 70090008	PANIT I TINDAK SUBADITGAKKUM
43	5	BAZARO GEA	IPDA / 68090196	PANIT II LIDIK SUBDITGAKKUM
44	6	SUGIARTO	IPDA / 71030047	PAMIN II SIFAS SUBDITFASHARKAN
45	7	MARTHIN EDI CANDRA	BRIPKA / 78030564	BA TINDAK SUBDITGAKKUM
46	8	RAHMAT MANURUNG	BRIGADIR / 73050404	BA LIDIK SUBDITGAKKUM
47	9	HERYANTO	BRIGADIR / 85051558	BA TINDAK SUBDITGAKKUM
48	10	HAERUL UMAMI	BRIGADIR / 85051898	BA TINDAK SUBDITGAKKUM
49	11	LAMHOT PASARIBU	BRIGADIR / 79120504	BA LIDIK SUBDITGAKKUM
50	12	AGUSTINO	BRIGADIR / 76080007	BA LIDIK SUBDITGAKKUM
51	13	HENDRO SUWITO, SH	BRIGADIR / 81080989	BA TINDAK SUBDITGAKKUM
52	14	ANTONIUS PN	BRIGADIR / 85101338	BA LIDIK SUBDITGAKKUM
53	15	INDRA SAPUTRA	BRIGADIR / 85051954	BALIDIK SUBDITGAKKUM
54	16	OKI YULIANSYAH, SE	BRIGADIR / 86071363	BA TINDAK SUBDITGAKKUM
55	17	SUHARNIANTO,SH	BRIGADIR / 88080968	BATINDAK SUBDITGAKKUM
56	18	ANDRI	BRIPTU / 90060300	BAMIN TINDAK SUBDITGAKKUM
57	19	AFRIZAL	BRIPTU / 92050045	BAMIN LIDIK SUBDITGAKKUM
		SATROLDA		
58	1	BUDHI RAYADI, S.Pd	AKBP / 68120028	KASATROLDA
59	2	AZWIR S	KOMPOL / 63030595	KASISAR BINMASAIR SATROLDA
60	3	PATEN TARIGAN, S.H.	AKP / 75080067	PS. KASIPATWAL SATROLDA
61	4	THOMAS CHARLES S.H	IPTU / 72050430	KANIT I PATWALAIR SATROLDA
62	5	MARA IMBANG DAULAY	IPTU / 61080863	PAMIN I SARBINMASAIR
63	6	SANDI	IPDA / 71010009	PANIT I PATWALAIR SATROLDA
64	7	ENDY SULISTIA	BRIPKA / 85010614	BA SATROLDA
65	8	HANDRES YUNAR SH	BRIPKA / 85050452	BA SATROLDA
66	9	RAJUH LASJUPANMA SH	BRIPKA / 85070550	KA UNIT MRKS TLG PUNGGUR/RIB 02
67	10	RISKY TRISTA HAKIM	BRIPKA / 86110001	BA SATROLDA
68	11	ZAINAL MUQOROBIN	BRIPKA / 71100518	BA SATROLDA
69	12	SUPRIYADI	BRIGADIR / 72080592	BA SAR BINMASAIR SATROLDA

70. BENI HENDRI.....

1	2	3	4	5
70	13	BENI HENDRI	BRIGADIR / 75100883	BA UNIT MRKS SELAT BELIAH/
71	14	NOVWANDI TANJUNG	BRIGADIR / 85111382	BA PATWALAIR SATROLDA
72	15	AKHMAD SAUKANI H	BRIGADIR / 78081200	BA SATROLDA
73	16	ADIKA SAPUTRA	BRIPDA / 97120285	BADEK KAPAL POL C3 MINI
74	17	TONI ANDA SIHOMBING	BHARATU / 91080314	TA SATROLDA
75	18	ELVAN WILLIAM	BHARATU / 92120133	TA SATROLDA
		SUBDITFASHARKAN		
76	1	SOFYAN	AKBP / 73110595	KASUBDIT FASHARKAN
77	2	YUSUF .T	IPTU / 63010870	PAMIN I SIHARKAN SUBDITFASHARKAN
78	3	TAHYA HARYANTO	IPDA / 67060248	PAMIN 2 SIFAS SUBDITFASHARKAN
79	4	MUHAMMAD ISMAIL	AIPDA / 68100346	PS.PAMIN I FASILITAS FASHARKAN
80	5	SYAFRAN EFENDI	BRIGADIR / 70121031	BA HARKAN SUBDITFASHARKAN
81	6	ADI MUSLIM NOER	BRIGADIR / 78100368	BA FASHARKAN
82	7	SUSANTI	BRIGADIR / 86071361	BA HARKAN SUBDITFASHARKAN
83	8	YUDHANTARA MUKTI	BHARADA / 94081279	TA FASHARKAN
		KAPAL RIB 01		
84	1	AHMAD	BRIPKA / 70121027	DAN KAPAL RIB 01
		KAPAL POL XXXI 1001		
85	1	WARSIDI	BRIGADIR / 74020194	DAN KAPAL POL XXXI 1001
86	2	RIKO ZULHENDRA	BRIGADIR / 85101822	BASIN KAPAL POL XXXI 1001
87	3	IQBALLUDDIN SIREGAR	BRIGADIR / 86061920	BADEK KAPAL POL XXXI 1001
88	4	CHRISTIAN AFRIANSYAH	BHARATU / 92040147	TADEK KAPAL POL XXXI-1001
		KAPAL POL XXXI 1002		
89	1	SUNARTO	BRIGADIR / 73040372	DAN KAPAL POL XXXI 1002
90	2	ILHAM	BRIGADIR / 86121039	BADEK KAPAL POL XXXI-1002
91	3	AGUS RUSMANTO	BRIGADIR / 86080712	BADEK KAPAL POL XXXI 1002
92	4	RICAT MAMPETUA T	BHARATU / 92100171	TADEK KAPAL POL XXXI-1002
		KAPAL POL XXXI 1003		
93	1	ACE RASIDIN	BRIGADIR / 73120280	DAN KAPAL POL XXXI-1003
94	2	FEBRIYAN RALITA	BRIGADIR / 86061894	BA SIN KAPAL POL XXXI 1003
95	3	GIANT ERLANGGA	BHARATU / 93060105	TADEK KAPAL POL XXXI 1003
96	4	ARIS PRABOWO	BHARATU / 94100023	TADEK KAPAL POL XXXI-1003
		KAPAL POL XXXI 1004		
97	1	SUPRIYANTO	BRIPKA / 84090924	KOMANDAN KAPAL POL XXXI-1004
98	2	LIBERTO	BRIPKA / 85110246	BADEK KAPAL POL XXXI 1004
99	3	KOSRA	BRIGADIR / 86061576	BA DEK KAPAL POL XXXI 1004
100	4	VREDY SATRIAWAN	BHARATU / 92100132	TA DEK KAPAL POL XXXI-1004
		KAPAL POL XXXI 1005		
101	1	NUNUNG JATMIKO	BRIGADIR / 74090152	DAN KAPAL POL XXXI 1005
102	2	WISTON PURNAMA HARAHAP	BRIGADIR / 86041809	BASIN KAPAL POL XXXI 1005
103	3	AMRINAL	BRIGADIR / 87070555	BADEK KAPAL POL XXXI -1005
104	4	SYAEFUL BAHRI	BHARATU / 94030034	TADEK KAPAL POL XXXI 1005
		KAPAL POL XXXI 1006		
105	1	AFRIANTO	BRIGADIR / 79040692	DAN KAPAL POL XXXI 1006
106	2	MONA JAYA	BRIGADIR / 81120808	BADEK KAPAL POL XXXI -1006
107	3	AMRIZAL	BRIGADIR / 85082021	BADEK KAPAL POL XXXI -1006
108	4	AGUSWAN	PENGDA / 196307181986031004	PEMSIN KAPAL POL XXXI-3001
		KAPAL POL XXXI 1007		
109	1	ADI LESTARI	BRIGADIR / 73080340	DAN KAPAL POL XXXI-1007
110	2	A. NUR EFENDI	BRIGADIR / 76020727	BADEK KAPAL POL XXXI-1007
111	3	MELKY BOY MARIO T	BRIGADIR / 87090526	BASIN KAPAL POL XXXI 1007
112	4	SAID SYABRI	BRIPDA / 98070087	BADEK KAPAL POL XXXI-1007
		KAPAL POL XXXI 2001		
113	1	SAPARUDDIN	AIPDA / 68020323	DAN KAPAL POL XXXI 2001
114	2	SUNARTO	BRIGADIR / 72110413	BADEK KAPAL POL XXXI 2001
115	3	RASIDI	BRIGADIR / 74030455	BADEK KAPAL POL XXXI 2001
116	4	ADLINAS	BRIGADIR / 78070491	BADEK KAPAL POL XXXI 2001
117	5	M .RIDHO	BRIGADIR / 89030557	BADEK KAPAL POL XXXI 2001

1	2	3	4	5
		KAPAL POL XXXI 2002		
118	1	DEDI RUSTANDI	BRIGADIR / 72120464	KOMANDAN KAPAL POL XXXI-2002
119	2	OTANI ZEBUA	BRIGADIR / 85101788	BADEK KAPAL POL XXXI 2002
120	3	JEPRI JULIUS EKO, SH	BRIGADIR / 87010689	BADEK KAPAL POL XXXI 2002
121	4	RAMOT SITIO	BHARATU / 92060151	TADEK KAPAL POL XXXI 2002
		KAPAL POL XXXI 2003		
122	1	TEDY PRAYITNO	BRIPKA / 86100339	DAN KAPAL POL XXXI 2003
123	2	BORISH WAGELF H	BRIPKA / 84041286	BADEK KAPAL POL XXXI 2003
124	3	HARIONO	BRIGADIR / 85101888	BADEK KAPAL POL XXXI 2003
125	4	IRWAN SIHOMBING	BRIGADIR / 86060760	BADEK KAPAL POL XXXI-2003
		KAPAL POL XXXI 2004		
126	1	DODDY EKA SAPUTRA	BRIPKA / 86020066	DAN KAPAL POL XXXI 2004
127	2	BUCHORI MUSLIM	BRIGADIR / 77120955	BADEK KAPAL POL XXXI 2004
128	3	HENDRA YUSMAN	BRIGADIR / 85100343	BADEK KAPAL POL XXXI 2004
129	4	JUPEN SIRAIT	BRIGADIR / 85111799	BASIN KAPAL POL XXXI 2004
		KAPAL POL XXXI- 2005		
130	1	SYHRUDIN	BRIPKA / 69080392	DAN KAPAL POL XXXI-2005
131	2	YOYOK DARSONO	BRIPKA / 76090011	BADEK KAPAL POL XXXI 2005
132	3	MUHAMMAD RAHIMIN JALIL	BRIGADIR / 85031663	BASIN KAPAL POL XXXI 2005
133	4	MUHAMMAD SAFRI	BHARATU / 91090273	TADEK KAPAL POL XXXI-2005
		KP. BARELANG / POL XXXI 3001		
134	1	HARIYONO	IPDA / 66100313	DAN KAPAL POL XXXI 3001
135	2	BUDI ELIZA, SH	BRIPKA / 72080284	BADEK KAPAL POL XXXI 3001
136	3	ABIN SAUT MARULI TUA S	BRIPKA / 84011000	BADEK KAPAL POL XXXI 3001
137	4	AGUS IWAN PURNOMO	BRIGADIR / 77080753	BADEK KAPAL POL XXXI 3001
138	5	PUTRA GUNAWAN Z	BRIGADIR / 84121740	BADEK KAPAL POL XXXI 3001
139	6	HENDRA AGUSTIAN S	BHARATU / 93030109	TADEK KAPAL POL XXXI-3001
		KP GALANG I / POL XXXI 3002		
140	1	RUSLANI	AIPDA / 68020325	DAN KAPAL POL XXXI 3002
141	2	DERI HARYONO.Amd	BRIPKA / 80101258	BADEK KAPAL POL XXXI-3002
142	3	SYAFRUDIN	BRIGADIR / 85051678	BADEK KAPAL POL XXXI-3002
143	4	MAHENDRA	BRIGADIR / 86021520	BADEK KAPAL POL XXXI 3002
144	5	BOY HARIADI	BRIGADIR / 88080662	BASIN KAPAL POL XXXI 3002
145	6	ALFIAN PUTRA	BRIGADIR / 88080807	BADEK KAPAL POL XXXI 3002
146	7	APRIADY SIMATUPANG	BRIGADIR / 89040435	BADEK KAPAL POL XXXI- 3002
147	8	DERISTO PARSAULIAN	BHARATU / 93120060	TADEK KAPAL POL XXXI- 3002

1	STAF	JUMLAH
1	- DIREKTUR	1
2	- WADIR	-
3	- SUBBAGRENMIN	30
4	- BAGBINOPSNAL	7
5	- SUBDITGAKKUM	19
6	- SATROLDA	18
7	- SUBDITFASHARKAN	8
	JUMLAH ANGGOTA STAF	85
	KAPAL POLAIR	
1	KAPAL RIB 01	1
2	KAPAL POL XXXI 1001	4
3	KAPAL POL XXXI 1002	4
4	KAPAL POL XXXI 1003	4
5	KAPAL POL XXXI 1004	4
6	KAPAL POL XXXI 1005	4
7	KAPAL POL XXXI 1006	4
8	KAPAL POL XXXI 1007	4
9	KAPAL POL XXXI 2001	5
10	KAPAL POL XXXI 2002	4

11	KAPAL POL XXXI 2003	4
12	KAPAL POL XXXI 2004	4
13	KAPAL POL XXXI 2005	4
14	KAPAL POL XXXI 3001	6
15	KAPAL POL XXXI 3002	8
	JUMLAH	62
	JUMLAH SELURUH	147

c. Kegiatan.....

c. Kegiatan Personel.

- 1) Kegiatan apel Personel Ditpolairud Polda Kepri;
- 2) Pelaksanaan latihan simulasi penanggulangan bencana kebakaran;
- 3) Kegiatan Olahraga personel Ditpolairud Polda Kepri;
- 4) Kegiatan Binrohtal personel Ditpolairud Polda Kepri;
- 5) Apel gelar pasukan operasi patuh seligi Tahun 2019;
- 6) Pelatihan peningkatan kemampuan personel Ditpolairud Polda Kepri;
- 7) Konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana narkoba;
- 8) Menghadiri rapat pembahasan RGB Draf road map RBP gel.IV Tahun 2020-2024 & monev RBP Gel III Tahun 2015-2019 Polda Kepulauan Riau;
- 9) Annev Bulanan Ditpolairud Polda Kepulauan Riau;
- 10) Upacara pemberian reward kepada Personel Ditpolairud Polda Kepri;
- 11) Rapat kesiapan Operasi Gabungan Timpora Laut di Kantor Imigrasi;
- 12) Sosialisasi Perkap No 1 Tahun 2019 tentang system managemen dan standar keberhasilan operasional Polri;
- 13) kegiatan Quick Wins giat I sosialisasi penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti pacasila di kelurahan sembulang, kecamatan galang;
- 14) Kegiatan Sholat Jumat Keliling personel Ditpolairud Polda Kepri;
- 15) Minggu Keliling personel Ditpolairud Polda Kepri di Gereja HKBP Kav.Sei Tering, Kec. Batu Ampar.

BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI

12. Analisa

a. Situasi Kamtibmas

Pelaksanaan tugas Direktorat Polisi Perairan dan Udara bulan Juli 2019 bidang Operasional dan Pembinaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga situasi kamtibmas di wilayah perairan pada umumnya dalam keadaan aman terkendali

b. Perkembangan situasi Kamtibmas

perkembangan situasi kamtibmas di wilayah perairan pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga hal ini perlu adanya antisipasi dalam pelaksanaan tugas di bidang operasional, beberapa faktor ini adalah dari manusia, sarana kondisi alam serta faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya kecelakaan maupun pelanggaran dan tindak pidana lainnya di wilayah perairan.

13.Evaluasi.....

13. Evaluasi

- a. Mengingat Wilayah Polda Kepulauan Riau sebagian besar perairan dan Kepulauan, Ditpolairud Polda Kepulauan Riau selalu mengsiagakan tim SAR untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di laut (laka – laut) dan bencana alam lainnya.
- b. Dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Ditpolairud Polda Kepulauan Riau namun dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga dapat terciptanya kondisi Kamtibmas perairan yang kondusif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

14. Kesimpulan

- a. Walaupun sarana dan prasarana yang di miliki oleh Ditpolairud Polda Kepulauan Riau terbatas, tapi dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, personel mempunyai disiplin yang tinggi. Personel Ditpolairud Polda Kepulauan Riau dapat melaksanakan seluruh kegiatan, baik kegiatan rutin maupun operasi kepolisian, sehingga secara umum dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan tertib, aman dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang di miliki oleh Ditpolairud Polda Kepulauan Riau saat ini, masih dapat menekan gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah Perairan Kepulauan Riau, kecuali perompakan dan pencurian ikan yang terjadi di Laut Natuna dan Laut Cina selatan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan jelajah (*endurance*) kapal patroli Ditpolairud Polda Kepulauan Riau yang terbatas dan hanya memiliki 14 Unit kapal tipe C, sedangkan untuk wilayah perairan tersebut dibutuhkan kapal tipe A dan B .

17. Saran

- a. Agar penempatan personel dalam struktur organisasi yang baru, ditempatkan personel yang mempunyai keahlian Sus Jur Polair / Ahli Bidang Perairan dan bagi personel yang belum mempunyai Jur Polair / Ahli Bidang Perairan yang akan di tempatkan di Ditpolairud untuk bisa mengikuti kejuruan terlebih dahulu.
- b. Mengingat ancaman yang dihadapi dan luasnya wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau yang sangat luas, maka perlu adanya penambahan alat apung yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah perairan Polda Kepulauan Riau yakni kapal Type B yang mempunyai daya jelajah tinggi.

18.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Bulanan Kegiatan Ditpolairud Polda Kepulauan Riau periode bulan Agustus 2019 ini dibuat guna dijadikan bahan masukan dalam mengambil langkah serta kebijaksanaan selanjutnya.

Batam, September 2019

DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
POLDA KEPULAUAN RIAU



BENYAMIN SAPTA T. S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70090400

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI KEGIATAN APEL PERSONEL DITPOLAIRUD POLDA KEPRI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI LATIHAN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA PEMADAM KEBAKARAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI KEGIATAN OLAHRAGA PERSONEL DITPOLAIRUD POLDA KEPRI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI KEGIATAN BINROHTAL PERSONEL DITPOLAIRUD POLDA KEPRI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI APEL GELAR PASUKAN OPERASI PATUH SELIGI TAHUN 2019



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL DITPOLAIRUD POLDA KEPRI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI KONFERENSI PERS UNGKAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI MENGHADIRI RAPAT PEMBAHASAN RGB DRAF ROAD MAP RBP GEL IV TAHUN 2020-2024 & MONEV RBP GEL III TAHUN 2015-2019 POLDA KEPULAUAN RIAU



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI ANNEV BULANAN DITPOLAIRUD POLDA KEPRI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI UPACARA PEMBERIAAN REWARD KEPADA PERSONEL DITPOLAIRUD POLDA KEPRI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI RAPAT KESIAPAN OPS GABUNGAN TIMPORA LAUT DI KANTOR IMIGRASI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI SOSIALISASI PERKAP NO 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM MANAGEMEN DAN
STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL POLRI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI KEGIATAN QUICK WINS GIAT I SOSIALISASI PENERTIBAN DAN PENEGAKKAN HUKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN ANTI PACASILA DI KELURAHAN SEMBULANG, KECAMATAN GALANG



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI KEGIATAN SHOLAT JUMAT KELILING PERSONEL DITPOLAIRUD POLDA KEPRI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

DOKUMENTASI MINGGU KELILING PERSONEL DITPOLAIRUD POLDA KEPRI DI GEREJA HKBP
KAV.SEI TERING, KEC. BATU AMPAR

